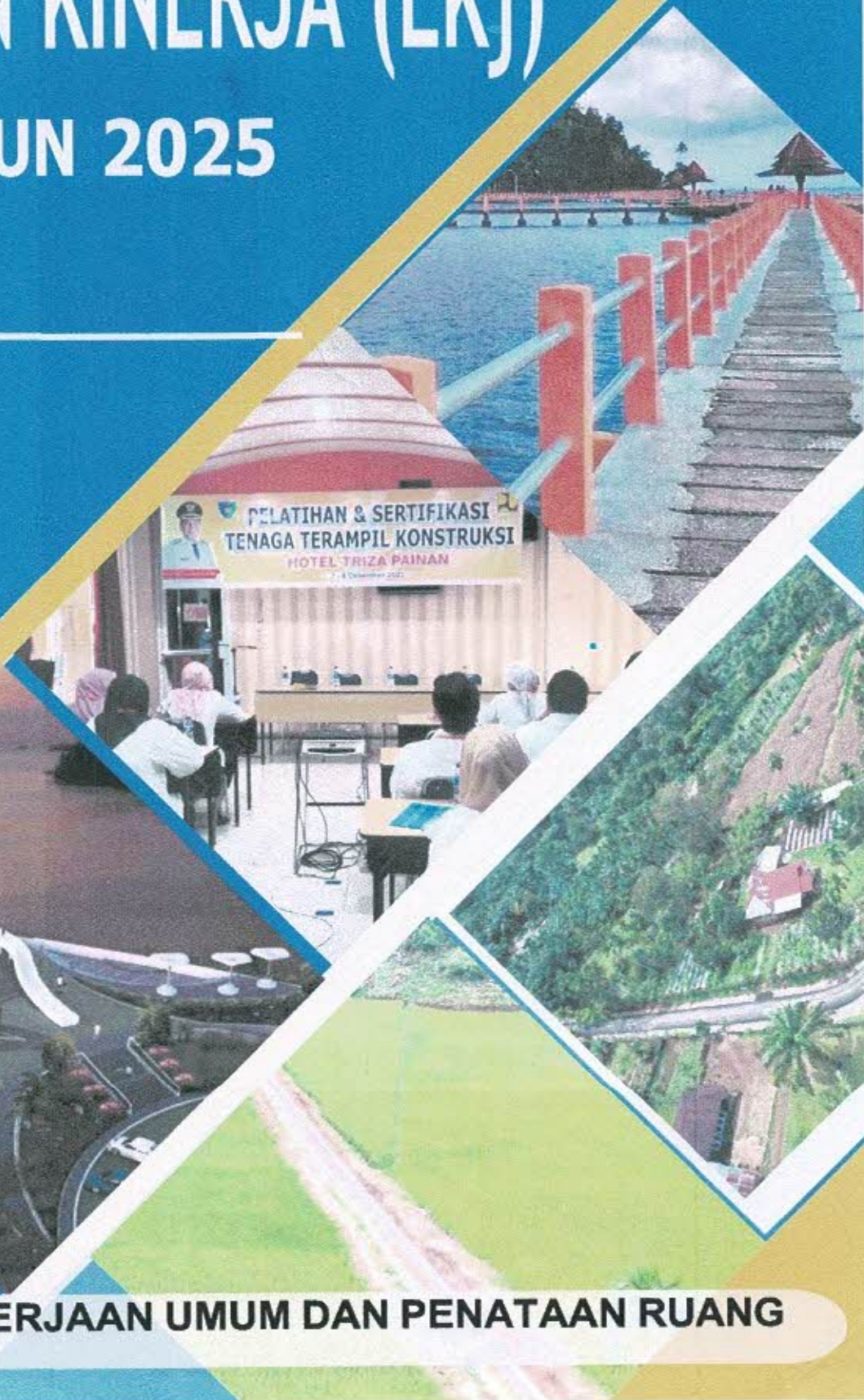




LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb...

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian maupun kendala dalam pelaksanaan target kinerja organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Strategis yang digunakan mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan, APBD Provinsi Sumatera Barat, serta APBN Tahun Anggaran 2025.

LKJ tidak hanya memaparkan keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga menguraikan tantangan serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut diperlukan upaya perbaikan dan perhatian serius guna mencapai target pembangunan yang lebih optimal di masa depan. Kita semua berharap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan ke depan dapat terus meningkat dengan memanfaatkan peluang serta potensi yang ada secara optimal. Selain itu, tantangan yang muncul harus diatasi dengan baik agar kinerja dinas semakin transparan, akuntabel dan lebih baik dalam mendukung pembangunan daerah.

Painan, 24 Februari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan



JAERI S. M.T

NIP. 1992021001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyajikan informasi tentang ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2025.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja Sasaran Strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2025, sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MISI 1						
<i>MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TRANSPARAN</i>						
Tujuan :						
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi						
1	Tersedianya Pemerintah yang akuntabel dan berkinerja	1 Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	A (80,1)	BB (79,42)	99,15%
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1 Nilai Kematangan Inovasi	Angka	80	92	115%
MISI 2						
<i>MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DAN MASYARAKAT.</i>						
Tujuan :						
Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat						
3	Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	1 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	%	90,01	90,01	100%
		2 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	78,36	77,84	99,33%

MISI 3**MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENDORONG SEKTOR POTENSI DAN UNGGULAN DAERAH****Tujuan :****Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan**

3	Terwujudnya Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Sektor Unggulan yang Berkualitas	1	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	%	50,65	48,35	95,46%
		2	Persentase jalan kabupaten Kondisi Baik	%	34,90	35,41	101,46%
		3	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	79,91	29,73	37,2 %
		4	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya	%	83,33	92,55	111,06%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I	
PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Maksud dan Tujuan	7
1.3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	8
1.4. Struktur Organisasi.....	8
1.5. Kepegawaian	17
1.6. Aspek Strategis Organisasi.....	18
1.7. Permasalahan Utama	18
1.8. Dasar Hukum	21
1.9. Sistematika Penyusunan	21
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	23
2.2 Perjanjian Kinerja.....	24
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	25
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	31
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	32
3.3 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.....	34
3.4 Akuntabilitas Keuangan	69
BAB	
IV	
PENUTUP.....	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	17
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	17
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025	24
Tabel 3. 1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan	31
Tabel 3. 2 Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja	32
Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja.....	35
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian.....	35
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen.....	36
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	37
Tabel 3. 7 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja.....	39
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja.....	40
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Nilai Inovasi Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	41
Tabel 3. 10 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis Nilai Inovasi.....	41
Tabel 3. 11 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Nilai Inovasi.....	42
Tabel 3. 12 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja.....	43
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja.....	44
Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	45
Tabel 3. 15 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis	46
Tabel 3. 16 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis	47
Tabel 3. 17 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2025	49
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja.....	50
Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	50
Tabel 3. 20 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	51

Tabel 3. 21 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
Tabel 3. 22 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja.....	54
Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja.....	55
Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	55
Tabel 3. 25 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	56
Tabel 3. 26 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
Tabel 3. 27 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja.....	58
Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja.....	59
Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	60
Tabel 3. 30 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	60
Tabel 3. 31 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61
Tabel 3. 32 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja.....	63
Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	64
Tabel 3. 34 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	65
Tabel 3. 35 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
Tabel 3. 36 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja.....	67
Tabel 3. 37 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	67
Tabel 3. 38 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	68
Tabel 3. 39 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	68
Tabel 3. 40 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.....	16
Gambar 3. 1 Hasil Penilaian Inovasi tahun 2025.....	39
Gambar 3. 2 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.....	48
Gambar 3. 3 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).....	48
Gambar 3. 4 Hasil Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025.....	53
Gambar 3. 5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Talang Ketaping.....	57
Gambar 3. 6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Banda Panjang.....	58
Gambar 3. 7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ambacan.....	58
Gambar 3. 8 Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Pauh, Kec. Sutera.....	62
Gambar 3. 9 Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 1.....	62
Gambar 3. 10 Dokumentasi Pelatihan & Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahun 2025	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas mengembangkan dan memelihara Sarana dan Prasarana Wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu Dinas menyusun rencana program dan kegiatan, baik yang bersifat jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan kebutuhan dan perkiraan dana yang tersedia.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu dinas penyelenggara urusan wajib yaitu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan alokasi dana sebesar Rp. 52.995.418,384,00,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 24.522.236.305,- dan belanja langsung sebesar Rp. 28.473.182.079,00,- untuk mengelola sebanyak 10 Program dan 20 kegiatan. Dana program dan kegiatan prioritas yang diselenggarakan ini sesuai dengan PP No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada DPRD kepada Masyarakat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja) Pemerintah Daerah. Bahan LKjIP ini selanjutnya menjadi masukan bagi Pemda dalam menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan LKJ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah untuk dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat terhadap keseluruhan program dan kegiatan yang telah diselenggarakan

selama 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan tujuannya adalah sebagai bahan masukan untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan hasil kerja (kinerja) dinas pada tahun anggaran berikutnya, sehingga sasaran untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat dapat dicapai.

1.3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Sago – Salido, Kecamatan IV Jurai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pada tanggal 28 Oktober 2021, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 163 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan irigasi, sungai/pantai, jalan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta pembinaan konstruksi.

1.4. Struktur Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, susunan organisasi dinas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir

Selatan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Air Minum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Tata Ruang, membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Ruang;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pengawasan Ruang.
- f. Bidang Bina Konstruksi, membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi.
- g. Bidang Irigasi dan Rawa, membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Irigasi dan Rawa;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa.
- h. Bidang Sungai dan Pantai, membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Sungai dan Pantai;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Pendayagunaan dan Konservasi Sungai dan Pantai; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai.
- i. UPTD; dan
- j. Jabatan Fungsional.

Secara rinci, tugas pokok dan fungsi masing – masing unsur pejabat pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Tugas :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan jalan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan, pembinaan jasa konstruksi serta pengelolaan Sumber Daya Air sesuai perundang-undangan.

Fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase, pembinaan jasa konstruksi, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air serta ketersediaan air untuk irigasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;

- b. penyelenggaraan penataan ruang Daerah;
- c. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- d. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- e. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- f. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. pemberian rekomendasi terhadap izin yang berhubungan dengan pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- l. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- m. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- n. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- o. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- p. pelaksanaan dukungan yang bersifat *substentif* kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

SEKRETARIS

Tugas :

- a. melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum,kepegawaian, keuangan, melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan Dinas.

Fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian rencana, program, anggaran, keuangan serta pelaporan Dinas;
- c. pengkoordinasian layanan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi umum dan kepegawaian;
- d. pengkoordinasian pendataan dan informasi publik;
- e. pengkoordinasian pengelolaan aset/barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang jasa;
- f. penataan organisasi dan tata laksana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG BINA MARGA

Tugas :

1. Membantu kepala dinas menyiapkan rumusan serta menyelenggarakan urusan bidang jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pendataan, perencanaan program, perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengawasan dan monitoring serta pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Bina Marga;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Bina Marga;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

Tugas :

1. Mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan keciptakarya.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;

- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang cipta karya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG TATA RUANG

Tugas :

- 4. Membantu kepala dinas menyusun dan melaksanakan Kebijakan Daerah urusan penataan ruang yang meliputi penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan penataan ruang;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tata Ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI

Tugas :

- 1. Membantu kepala dinas dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengaturan jasa Konstruksi, dan pengawasan jasa Konstruksi.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengaturan jasa konstruksi, pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengaturan jasa konstruksi, pengaturan jasa konstruksi pemberdayaan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengaturan jasa

- konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi;
- e. penyiapan bahan data serta menyusun dan menyiapkan laporan di bidang bina jasa dan konstruksi.
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

KEPALA BIDANG PELAKSANA JARINGAN PEMANFAATAN AIR

Tugas :

1. Membantu kepala dinas mendata, merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan irigasi dan rawa.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan, data base yang berbasis kinerja yang berhubungan dengan Irigasi dan Rawa;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang;
- c. pembagian tugas, memberi petunjuk atau arahan kepada bawahan di lingkup bidang;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG PELAKSANA JARINGAN SUMBER AIR

Tugas :

1. Membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang sungai dan pantai sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan, data base yang berbasis kinerja yang berhubungan dengan sungai, pantai dan konservasi;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang;
- c. pembagian tugas, memberi petunjuk atau arahan kepada bawahan di lingkup bidang;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.5. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

JABATAN FUNGSIONAL

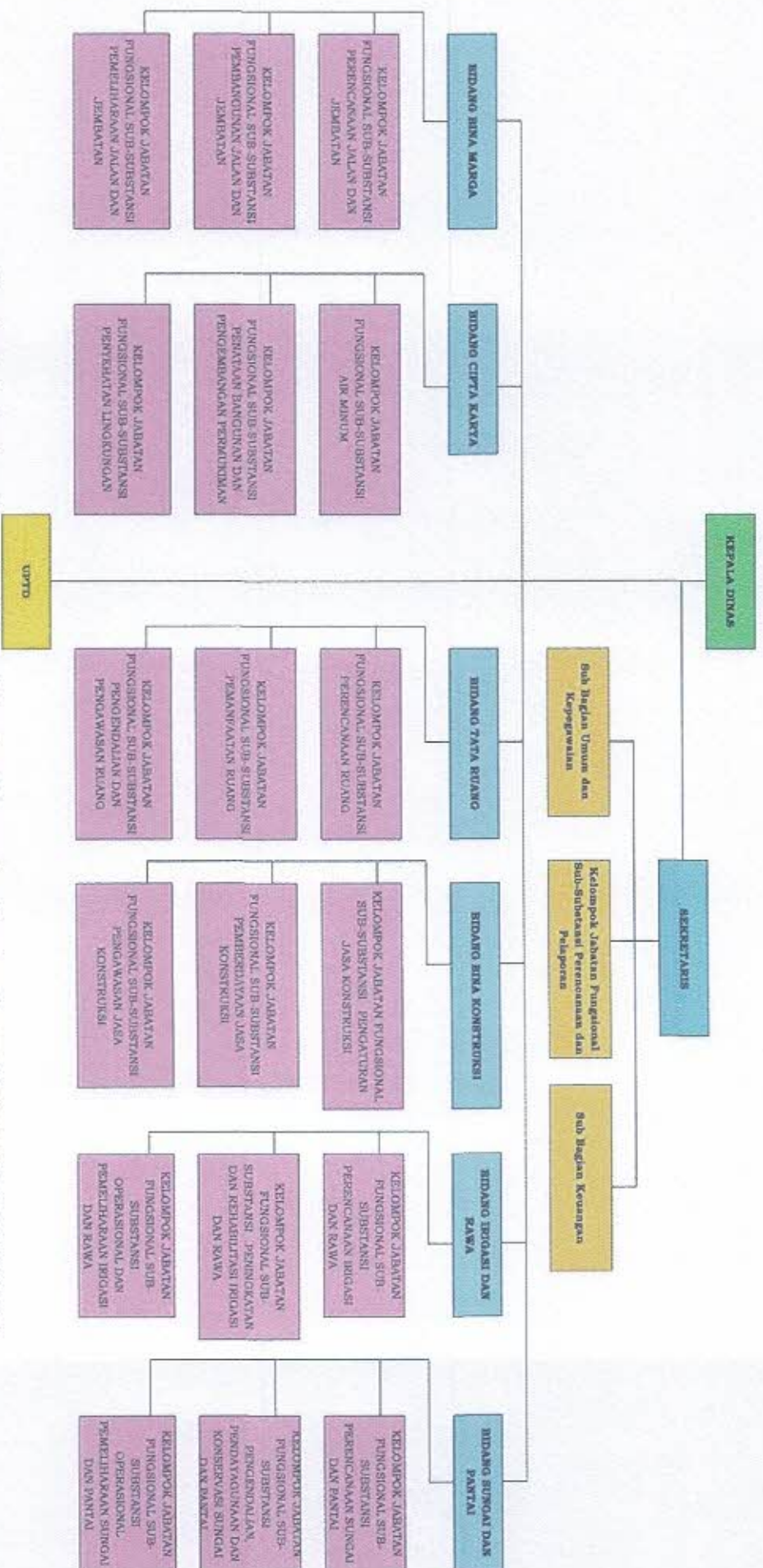
Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Klasifikasi Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Klasifikasi Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk diantaratenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

1.6. Kepegawaian

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 23 Februari Tahun 2026 di laksanakan oleh 250 (Dua Ratus Lima Puluh) orang yang terdiri dari 96 (sembilan puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 154 (Seratus Lima Puluh Empat) PPPK Penuh waktu dan PPPK Paruh Waktu. Jumlah Pegawai Laki-laki sebanya 189 (Seratus Delapan Puluh Sembilan) Orang atau

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20225

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki – laki	189 Orang	75,60 %
Perempuan	61 Orang	24,40%
Jumlah	250 Orang	100 %

Sumber: Bezetting Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 3 february 2026

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh jenjang pendidikan S1.

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	9	3,6%
2	S1	100	40%
3	D4	2	0,8%
4	D3	21	8,4%
5	SLTA	114	45,6%
6	SLTP	4	1,6%
	Jumlah	96 Orang	100%

Sumber: Bezetting Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 3 february 2026

1.7. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peran dalam mendukung terlaksananya 6 Misi Kepala Daerah telah dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Misi tersebut memiliki 3 tujuan dengan sasaran serta strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

VISI 1	<i>MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTANSI DAN PROFESIONAL</i>		
MISI 1	<i>MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TRANSPARAN</i>		
MISI 2	<i>MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DAN MASYARAKAT</i>		
MISI 3	<i>MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENDORONG SEKTOR POTENSI DAN UNGGULAN DAERAH</i>		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Tersedianya Pemerintah yang akuntabel dan berkinerja Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatkan Implementasi reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan • Meningkatkan Nilai Indeks Inovasi
Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	Menyediakan layanan Infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Sektor Unggulan yang Berkualitas	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur penunjang sektor unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan • Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi • Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur

1.8. Permasalahan Utama

Perwujudan pembangunan infrastruktur terlihat melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Sungai dan Pantai, Infrastruktur Sanitasi, ini juga berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan perlu di rancang dan dilaksanakan secara sistematis serta berkualitas. Hal ini juga dapat

bertujuan untuk menciptakan peluang ekonomu, memberikan manfaat sosial, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong partisipasi politik di seluruh lapisan masyarakat.

Berikut identifikasi permasalahan didalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya di atas, maka isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Sekretariat
 1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah
 2. Masih kurangnya tenaga pengelola administrasi keuangan

- b. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Sungai dan Pantai
 1. Ancaman terhadap infrastruktur sumber daya air akibat gempa, longsor, banjir dan abrasi Pantai.
 2. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengendali daya rusak air
 3. Peningkatan pemanfaatan daerah sempadan sungai yang tidak terkontrol
 4. Belum memadainya sarana dan prasarana/operasi dan pemeliharaan untuk bangunan pengendali daya rusak air
 5. Makin banyaknya penebangan hutan dan alih fungsi lahan pada daerah aliran sungai

- c. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Irigasi dan Rawa
 1. Tenaga Operasional dan Pemeliharaan yang belum terpenuhi secara kualitas
 2. Ancaman terhadap infrastruktur irigasi akibat banjir
 3. Kurangnya peran aktif kelembagaan petani
 4. Belum cukupnya regulasi daerah yang mengatur tentang irigasi dan kelembagaannya
 5. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang Operasi dan Pemeliharaan untuk sumber daya air (peralatan OP, alat transportasi, kantor, alat komunikasi, jadwal pelaksanaan OP)
 6. Belum optimalnya kinerja layanan infrastruktur irigasi
 7. Belum adanya sempadan irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan kabupaten

- d. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Bina Marga,
Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada bab sebelumnya terdapat beberapa permasalahan penyelenggaraan jalan dan jembatan adalah sebagai berikut:
 1. Masih adanya jalan dalam kondisi rusak yang perlu diperbaiki dengan program

penyelenggaraan jalan.

2. Minimnya peralatan kebinamargaan, sehingga data yang diperoleh kurang representatif.
 3. Masih kurangnya dukungan sarana peralatan kebinamargaan, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemeliharaan jalan dan jembatan menjadi lambat.
 4. Terbatasnya kemampuan pendanaan penyelenggaraan jalan dari Pemerintah dibanding kebutuhan terhadap life time & Panjang penanganan jalan dan jembatan.
 5. Masih seringnya terjadi kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam.
- e. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Cipta Karya
1. Belum adanya data base penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar kawasan permukiman, baik pelayanan jalan lingkungan, drainase maupun sanitasi.
 2. Masih banyak para pelaksana kegiatan pembangunan Gedung pemerintah pada SKPD yang belum memahami ketentuan Pembangunan gedung Negara sebagaimana diatur pada Perpres No. 73 tahun 2011 dan Permen PU No. 45 Tahun 2007.
- f. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Tata Ruang
1. Kurangnya sosialisasi tentang penataan ruang
 2. Belum efektifnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
 3. Kurangnya peraturan standar pelayanan minimal tentang tata ruang
 4. Kurangnya personal PNS bidang tata ruang
 5. Belum optimalnya pengawasan bidang tata ruang
 6. Belum optimalnya perencanaan tata ruang pada Kawasan Strategis Kabupaten
- g. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Bina Kosntruksi
1. Kurangnya regulasi pembinaan jasa konstruksi
 2. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia jasa konstruksi tentang penyelenggaraan dan tertib jasa konstruksi
 3. Belum optimalnya pengawasan Bidang Bina Konstruksi
 4. Belum optimalnya penghimpunan data Sistem Informasi Jasa Konstruksi
 5. Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder belum berjalan dengan optimal

1.9. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Nomor 193 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.10. Sistematika Penyusunan

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini berisi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2025 tentang capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 yang diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja/TAPKIN (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- BAB I** – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir selatan dan struktur organisasi serta tujuan penyusunan LKj
- BAB II** – Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan berbagai kebijakan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan penetapan kinerja untuk tahun 2025
- BAB III** – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2025.
- BAB IV** – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang atau Tahun 2026.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

Dalam Penyusunan Renstra ini harus mencakup visi, misi program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Adapun Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah:

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional”

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, diperlukan suatu perencanaan strategis melalui Penelaahan Visi dan Misi serta cara Pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efisien. Misi menjadi alasan utama mengapa organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja oleh segenap stakeholder pembangunan. Berdasarkan visi diatas ditetapkan misi Kepala Daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis;

Dari ke-6 (enam) misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD 2021 - 2026, maka **misi ke-1 (satu)**, **misi ke-2 (dua)** dan **misi ke-3 (tiga)** adalah misi

yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Misi pertama adalah “*Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan*” dan Misi Kedua adalah “*Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat*” dan Misi ketiga adalah “*Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah*”.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ditetapkan dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026 yang telah diriviu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan maupun sub kegiatan. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat Perubahan Perjanjian Kinerja yang harus mengakomodir RPJMD 2021-2026.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,1)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas PUTR	80
3	Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten (%)	90,01 %
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (%)	78,36 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik (%)	34,90 %
		Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik (%)	50,56 %
	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	79,91 %
		Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana peruntukannya (%)	83,33 %

Adapun tujuan sasaran kinerja yang terdapat pada LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Renstra dan PK pada Tahun 2025, untuk sasaran “Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja” dengan indikator “Nilai RB Perangkat Daerah” tidak dimuat dalam PK dan LKj karena untuk indikator ini sejak Tahun 2023 hanya dikeluarkan dibagian Organisasi tidak untuk OPD .

2.3 Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :

1. Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2025
Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara (ha)	10.108
	$\frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota (ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota (ha)}} \times 100\%$	$\frac{10.108}{20.907} \times 100\% = 48,35$

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2025
1) Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$	$\frac{40.365}{69.000} \times 100\%$ <p>= 58,50</p>
2) Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam Kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100\%$	$\frac{65.224}{143.000} \times 100\%$ <p>= 45,61</p>
3) Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100\%$	$\frac{31.150}{60.840} \times 100\%$ <p>= 51,20%</p>

2. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2025
Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang jalan keseluruhan diwilayah kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{826,19}{2333,18} \times 100\%$ <p>= 35,41 %</p>

**Jenis, Kondisi Jalan dan Status Jalan
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2025**

No	Jenis Kondisi Jalan	Status Jalan Kabupaten				
		2021(Km)	2022 (Km)	2023 (Km)	2024 (Km)	2025
A		Jenis Permukaan				
1	Aspal	687.53	721.10	773.82	770.48	867,17
2	Kerikil	700.38	669.84	648.33	616.65	615,43
3	Beton	215.91	213.02	213.50	271.98	334,43
4	Tanah	707.21	706.77	697.53	654.87	516,15
Jumlah		2333.18	2333.18	2333.18	2333.18	2333,18
B		Kondisi Jalan				
1	Baik	718.11	754.59	796.11	813.70	826,19
2	Sedang	255.56	245.38	233.35	232.85	223,64
3	Rusak	382.64	371.56	365.97	380.49	74,09
4	Rusak Berat	976.87	961.78	937.75	906.14	1209,27
Jumlah		2333.18	2333.18	2333.18	2333.18	2333,18

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Dinas PUTR Tahun 2025

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA TA 2025
1)	Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK jalan Kewenangan Kabupaten/Kota (km)	2333,18
2)	Panjang Jalan yang direkonstruksi (km)	5,963
3)	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (km)	0,4285
4)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (km)	0,838
5)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	11 Dokumen

3. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2025
Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat (rumah tangga) yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan Perpipaan terlindungi di dalam kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota}} \times 100\%$	$\frac{99.435}{110.466} \times 100\% = 90,01 \%$

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2025
1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada
2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak
3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggaraan SPAM	1 BUMD (Perumda AM Tirta Langkisau)
4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak
5) Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Ada (Pamsimas dan SPAM IKK Air Sonsang)

4. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2025
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk+jumlah rumah yang lumpur tinjanya dioleh di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di kabupaten/kota}} \times 100\%$	$\frac{85.998}{110.466} \times 100\% = 77.84 \%$

Keterangan	<ul style="list-style-type: none">▪ Yang dimaksud dengan cubluk adalah tempat penampungan tinja atau disebut juga tanki septik (septic tank)▪ Yang dimaksud dengan IPLT/Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja merupakan instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat▪ Yang dimaksud dengan IPALD/Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik merupakan bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik▪ Data ini bersifat Akumulatif dan Alternatif, yang artinya bisa salah satu baik Cubluk, IPLT dan IPALD, atau Ketiga-tiganya.▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci per kecamatan
------------	--

5. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2025
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	$\frac{102}{343} \times 100\%$ = 29,73%

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2025
1) Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/ kota	1 Kali
2) Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	102 Orang
3) Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota	343 Orang
4) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada
5) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada
6) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari Pendanaan lainnya	Ada
7) Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merujuk pada kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mencakup proses untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan, seperti perencanaan, pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, dan pengelolaan ruang, dilakukan secara efisien, efektif, dan transparan telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai sasaran strategis dinilai berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang relevan. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana sasaran strategis serta indikator kinerja telah berhasil atau belum tercapai, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Sumber : *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3. 2 Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tersedianya Pemerintah yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (80,1)	BB (79,42)	99,15%
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas PUTR	Tanpa Satuan	80	92	115%
3	Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	%	90,01	90,01	100%
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	78,36	77,84	99,33%
4	Terwujudnya Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Sektor Unggulan yang Berkualitas	Proposi lahan sawah beririgasi baik	%	50,65	48,35	95,46%
		Persentase jalan kabupaten Kondisi Baik	%	34,90	35,41	100,46%
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	79,91	29,73	37,2%
		Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya	%	83,33	92,55	111,06
Rata - Rata						94,71%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Sebagaimana pada tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu :


1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan target A (80,1).
Capaian indikator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berhasil meraih nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 79,42 atau 99,15%, yang setara dengan predikat "sangat baik" (BB). Nilai AKIP ini didasarkan pada evaluasi kinerja tahun 2024. Hal ini dikarenakan nilai AKIP untuk tahun 2025 baru dapat diperoleh setelah evaluasi laporan kinerja tahun 2025 selesai, yang diperkirakan sekitar bulan Maret 2025.
2. Nilai Kematangan Inovasi, yang mengukur seberapa baik suatu dinas dalam berinovasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Pesisir Selatan dengan target 80. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan adalah 92 atau sebesar 115% dengan predikat yang didapatkan "Sangat baik".
3. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten dengan target 90,01 dengan capaian indikator pada angka 90,01 atau sebesar 100 % dengan predikat "sangat baik". Capaian ini bisa terjadi karena adanya bantuan anggaran dari APBN melalui program PASIMAS sebesar Rp. 2.000.000.000 untuk sub bidang air minum, sedangkan APBD hanya menganggarkan Rp. 337.000.000 untuk perbaikan sarana air minum yang rusak. Hal ini terjadi karena efisiensi anggaran yang sangat tinggi pada bidang pekerjaan umum.
4. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik dengan target yang ditetapkan 78,36 dan capaian indikator yang didapatkan 77,82 atau sebesar 99,31% dengan predikat "sangat baik". Capaian indikator ini juga belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Adanya efisiensi anggaran sehingga beberapa unit pembangunan tangki septik skala individual tidak terlaksana sehingga target tidak terpenuhi 100%

5. Proposi lahan sawah beririgasi baik dengan target yang ditetapkan pada angka 50,65 dan capaian indikator 48,35 atau sebesar 95,46% dengan predikat “Baik”. Capaian indikator Proposi lahan sawah beririgasi baik, untuk target yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat dicapai akibat terjadinya bencana alam seperti banjir yang terjadi pada tahun 2025 yang menyebabkan berdampak pada pekerjaan yang ada di lapangan
6. Persentase jalan kabupaten Kondisi Baik dengan target yang ditetapkan adalah 34,90 dan capaian 35,41 atau sebesar 100,46% dengan predikat “sangat baik”. Capaian indikator ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025.
7. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan target yang ditetapkan adalah 79,91 dengan capaian 29,73 atau sebesar 37,2% dengan predikat yang di dapatkan adalah “Kurang Baik”. Setelah melakukan kajian mendalam, kami menemukan bahwa target yang ditetapkan memiliki tingkat kesulitan yang signifikan. Kami percaya bahwa dengan penyesuaian yang tepat, target ini akan lebih mudah dicapai dan memberikan hasil yang optimal dan juga keterbatasan anggaran untuk merealisasikan indikator Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2025. Adapun faktor penghambatnya yaitu keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan jasa konstruksi, adanya biaya sertifikasi kerja (SKK) dan belum optimalnya pengetahuan masyarakat jasa konstruksi terhadap pentingnya sertifikasi profesi.
8. Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya dengan target yang ditetapkan adalah 83,33 dengan capaian 92,55 atau sebesar 111,06% dengan predikat adalah “Sangat baik”. Capaian ini melampaui dari target yang di tetapkan pada tahun 2025.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 untuk capaian rata-rata dengan 8 (delapan) indikator kinerja tersebut mencapai 94,71% dengan predikat “ **Sangat Baik**”.

3.3 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian dalam Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (80,1)	A (79,42)*	99,15%

*Datatan: *Data Capaian Tahun 2024*

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Dinas PUTR Tahun 2026

Pada tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mencapai 99,15%, dimana Nilai AKIP Tahun 2025 masih menggunakan Nilai AKIP Tahun 2024 dikarenakan Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 belum tersedia. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP tahun 2025 yaitu dengan menindaklanjuti secara konsisten rekomendasi hasil evaluasi SAKIP sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan 3 Tahun terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 3 tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, 2024, dan tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target			Realisasi			Capaian		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A	A	BB	A (84,14)	A (86,42)	BB (79,42)*	A (100)	A (102,71)	BB (99,15)

Catatan: *Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Dinas PUTR Tahun 2026

c. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra)

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (79,42)	A (90)	88,24	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

d. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar nasional belum bisa kami dapatkan karena untuk nilai capaian standar dari nasional, provinsi dan nasional belum dipublikasikan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Capaian indikator Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikategorikan termasuk "Sangat Baik". Tahun 2025, target Perjanjian Kinerja (PK) untuk nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah A (80,1). Nilai AKIP didapat berdasarkan penilaian oleh Inspektorat atas Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024, nilai yang diberikan oleh Inspektorat adalah BB (79,42)

dengan predikat Sangat Baik. Adapun faktor penyebab kegagalan terhadap target yang ditetapkan adalah keterkaitan antara perencanaan (Renstra, Perjanjian Kinerja) dan Implementasi program/kegiatan belum sepenuhnya konsisten, target kinerja yang ditetapkan relatif tinggi dibandingkan kapasitas sumberdaya yang tersedia, kualitas data dukung dan evidence belum sepenuhnya lengkap atau terdokumentasi dengan baik. Adapun alternatif solusi yang akan dilakukan adalah memastikan konsistensi dan keterkaitan antara RPJMD, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Melakukan monitoring dan evaluasi triwulan secara terukur, menyusun analisis capaian kinerja yang menghubungkan realisasi fisik, keuangan dan manfaat, melengkapi evidence secara sistematis dan terdokumentasi digital.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir. Berikut tabel 3.6 membahas perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target :

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,1)	A (79,42)*	99,15	13.308.473.708,-	12.987.450.225,-	97,59	1% (Efisien)

Catatan *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus yang bersumber dari PMK Nomor 214/PMK.02/2017 sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 99%. Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 adalah BB (80,1), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 sebesar A (79,42) serta untuk capaian kinerja sebesar 99,15%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 3.28 % apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023 sebesar A

(84,14). Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKP; dan
- c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

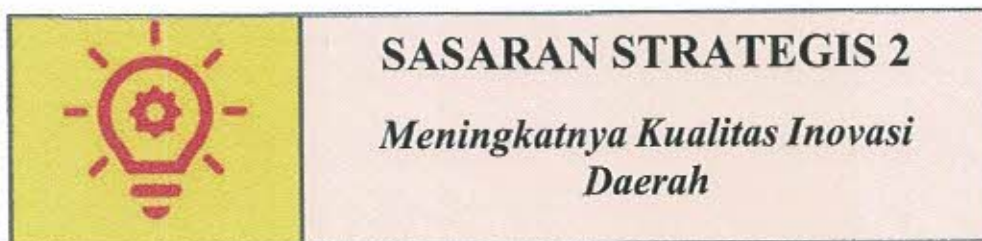
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 12,987.450.225,- atau 97,59% dari total anggaran sebesar Rp. 12.987.450.225,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2,41%.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

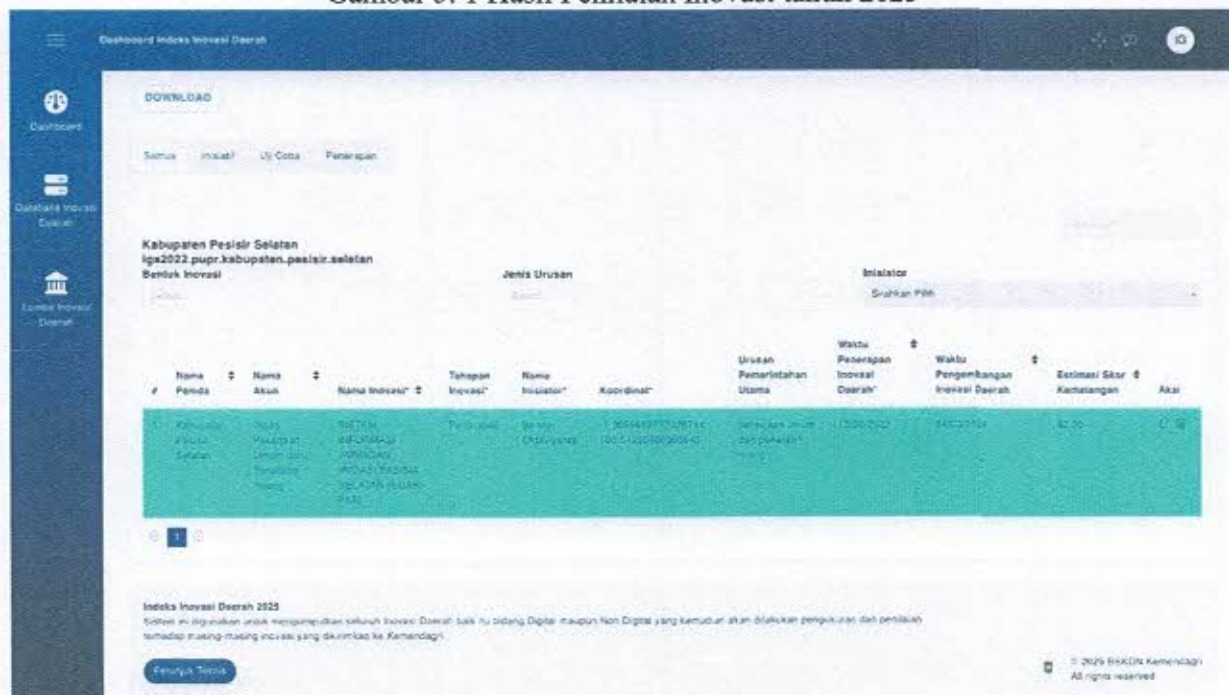
Perbandingan antara nilai target dengan realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi OPD	%	80	92	115	

Sumber : Bidang Irigasi dan Rawa Tahun 2025

Gambar 3. 1 Hasil Penilaian Inovasi tahun 2025



Dari Tabel 3.7 diatas dapat dilihat realisasi Nilai Inovasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bisa dilihat penilaiannya di Aplikasi IGA dengan Target 80 dengan realisasi 92 maka didapatkan Capaian Kinerja 115%. Inovasi yang disetujui (*approve*) dengan nama **SIJARI-PAS** (Sistem Informasi jaringan Irigasi Pasisia Selatan) aplikasi ini adalah suatu inovasi baru untuk bidang Irigasi dan Rawa untuk efektivitas koordinas database pengelolaan aset irigasi dan pelaporan pekerjaan Bidang Irigasi dan Rawa kewenangan Kabupaten dari pengawa, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Bidang Pelaksana Kegiatan. Manfaat yang diperoleh dari Aplikasi Sistem Informasi Jaringan Irigasi Pasisia Selatan (SIJARI-PAS) ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengguna aplikasi dalam rangka mendapatkan Database dan informasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Irigasi dan Rawa.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 2 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Nilai Inovasi dengan 3 Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target			Realisasi			Capaian		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Kematangan Inovasi OPD	Tanpa Satuan	100	100	100	41,00	37,00	92	41	37,00	115

Dari table 3.8 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun mengalami penurunan nilai inovasi pada tahun 2025.

c. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra)

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Kabupaten Pesisir Selatan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Nilai Inovasi Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Kematangan Inovasi OPD	92	100	92	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

d. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa kami dapatkan karena untuk nilai capaian standar dari nasional, provinsi dan nasional belum dipublikasikan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3. 11 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis Nilai Inovasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi OPD	Tanpa Satuan	82	100	115	Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendorong pengemabangan inovasi, yang diwujudkan melalui dukungan kebijakan internal, pemberian arahan strategis serta pengendalian dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan inovasi. Terjalannya koordinasi dan kolaborasi lintas bidang yang efektif turut mempercepat proses implementasi dan penyempurnaan inovasi	Pengembangan inovasi pada Dinas PUTR telah dilaksanakan secara konsisten, terarah dan berorientasi pada hasil. Keberhaslan ini diharapkan dipertahankan melalui penguatan keberlanjutan inovasi serta peningkatan kualitas tata kelola kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya capaian inovasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang:

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendorong pengembangan inovasi, yang diwujudkan melalui dukungan kebijakan internal, pemberian arahan strategis, serta pengendalian dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan inovasi.
2. Terjalannya koordinasi dan kolaborasi lintas bidang yang efektif, turut mempercepat proses implementasi dan penyempurnaan inovasi.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3. 10 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Nilai Inovasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Kematan gan Inovasi OPD	80	92	115	529.671.687,-	461.566.522,-	87,14	Efisien

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai evaluasi berdasarkan hasil penilaian:

1. Inovasi berupa aplikasi, diharapkan sudah bisa diakses dan dipergunakan untuk publikasi
2. MoU (Perjanjian Kerjasama) untuk penggunaan aplikasi oleh daerah lain
3. Tidak ada keterlibatan aktif akademisi dalam pembuatan aplikasi

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akurasi dan Informasi pelaksanaan kegiatan Bidang Irigasi dengan Aplikasi Mobile.
2. Terlaksananya susunan Database secara digital Irigasi sehingga jangkauan akses dalam penggunaannya dapat diakses oleh kepala pengamat, Juru Pengairan serta Penjaga Pintu air/bendung Peningkatan pengawasan dan pelaporan dalam pelaksanaan pekerjaan yang

bisa di input oleh pengawas pekerjaan.

3. Dengan Aplikasi Sijari dapat mengakses aplikasi digital lain seperti E-paksi dan Google Drive.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan Bidang Irigasi dan Rawa

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar Rp. 461.566.522,- atau 87,14% dari total anggaran sebesar Rp. 529.671.687,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 13%.



Sasaran Strategis Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentang Miskin terdiri atas 2 (empat) indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

1. **Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten**

g. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antar nilai target dengan realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	90,01	90,01	100
Rata-rata capaian (%)						100

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat (rumah tangga) yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota}} \times 100\%$$

$$= \frac{99.435 \text{ (Rumah Tangga)}}{110.466 \text{ (Rumah Tangga)}} \times 100\% = 90,01\%$$

g. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Rumah Tangga di seluruh Kabupaten/ Kota dengan 2 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan di Kab/ Kota 3 Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target			Realisasi			Capaian		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	97,87	98,58	90,01	89,88	89,99	90,01	91,48	91,29	100

Dari table 3.8 di atas dapat dilihat bahwa ada peningkatan tiap 3 tahun terakhir pada sasaran strategis Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin dengan Indikator Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh

kabupaten dimaksud dengan persentase yang tinggi menunjukkan sebagian besar rumah tangga yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki akses terhadap air minum yang aman dan layak

g. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Pesir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Peissiir Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Nilai Inovasi Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	90,01	98,58	91,31	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

g. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Untuk indikator kinerja Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa kami dapatkan karena untuk nilai capaian standar dari nasional, provinsi dan nasional belum dipublikasikan.

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.16 dibawah ini :

Tabel 3. 14

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan

Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	90,01	90,01	100	Capaian ini bisa terjadi karena adanya bantuan anggaran dari APBN melalui program PASIMAS sebesar Rp. 2.000.000.000 untuk sub bidang air minum, sedangkan APBD hanya menggarakan Rp. 337.000.000 untuk perbaikan sarana air minum yang rusak. Hal ini terjadi karena efisiensi anggaran yang sangat tinggi pada bidang pekerjaan umum	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program-program air minum

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prsarana pelayanan dasar masyarakat adalah :

1. Adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan, terutama oleh PPTK. Setiap keterlambatan pekerjaan oleh pelaksanaan segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya
2. Koordinasi dengan stakeholder intens dilakukan, khususnya dalam penyusunan perencanaan SPAM sehingga permasalahan terjadi karena sulitnya mencari sumber air dengan debit besar dan tidak menimbulkan konflik sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, survey awal kelokasi sumber perlu dilakukan dan koordinasi sampai ke level Nagari

Melalui pembentukan Pokja Sanitasi Kabupaten, Kita dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan ke-Pokjaan sehingga pembinaan dan pendampingan terhadap pencapaian akses sanitasi Kabupaten Kota dapat terus ditingkatkan.

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3. 15

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Indikator Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	90,01	90,01	100	337.000.000,-	278.008.550,-	82,50	Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin dengan indikator Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten didukung oleh program/keberhasilan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung yaitu :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)



Gambar 3. 2 Perbaikan outlet Bak WTP dan perbaikan jaringan perpipaa distribusi Tahun 2025 di Nagari Sakato Kec. Batang Kapas



Gambar 3. 3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2025 di Nagari Ampang Tareh Lumpo Kec. IV Jurai

2. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan anatar nilai target dengan realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3. 17

Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik (%)	%	78,36	77,82	99,33
Rata-rata capaian (%)						99,33

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan} \\
 & \text{berupa cubluk+jumlah rumah yang lumpur} \\
 & \text{tinjanya dioleh di PLT + jumlah rumah yang} \\
 & \text{memiliki sambungan rumah dan air limbahnya} \\
 & \text{diolah di} \\
 & \text{IPALD} \\
 & \hline
 & \text{Jumlah rumah di kabupaten} \qquad \qquad \qquad \times 100\% \\
 & \frac{85.998 \text{ (Rumah Tangga)}}{110.466 \text{ (Rumah Tangga)}} \times 100\% \\
 & = 77,84\%
 \end{aligned}$$

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut Tabel 3.18 membahas tentang perbandingan indikator kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir bisa dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 18
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik 3 Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target			Realisasi			Capaian		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	77,48	78,36	78,36	77,35	77,40	77,84	99,35	98,77	99,33

Dari Tabel 3.18 dapat dilihat bahwa ada peningkatan tiap 3 tahun terakhir pada sasaran strategis Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin dengan indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dimaksud dengan persentase yang tinggi menunjukkan sebagian besar rumah tangga yang ada di kabupaten pesisir selatan telah memiliki akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik yang memadai.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 18

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	77,84	80,18	97,08	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Untuk indikator kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa kami dapatkan karena untuk nilai capaian standar dari nasional, provinsi dan nasional belum dipublikasikan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat dilihat pada Tabel 3.20 dibawah ini :

Tabel 3. 19 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisas	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	78,36	77,84	99,33	Adanya efisiensi anggaran sehingga beberapa unit pembangunan tangki septik individual tidak terlaksana sehingga target tidak terpenuhi 100%	Optimalisasi anggaran yang ada, mencari sumber pendanaan alternatif, berinovasi dalam pengelolaan anggaran, meningkatkan kapasitas SDM, serta melibatkan masyarakat, diharapkan target cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik dapat tercapai.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3. 20 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	78,36	77,84	99,33	8.440.685.000,-	7.487.946.897,-	88,71	Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin dengan indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik didukung oleh program/keberhasilan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung yaitu :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
- Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Penyediaan Saran Pengangkutan Lumpur Tinja

- Operasi dan Pemeliharaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPLAD)

Hasil Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten pada tahun 2025 seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar 3. 4 Hasil Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025



SASARAN STRATEGIS 4
***Terpenuhinya Kebutuhan
Infrastruktur Penunjang Ekonomi
Unggulan***

Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan terdiri atas 4 (empat) indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian dalam meningkatnya Kebutuhan Infrastruktur di Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara nilai target dengan realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.23 sebagai berikut :

Tabel 3. 23 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik	%	50,65	48,35	95,46
Rata-rata capaian (%)						95,46

Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik (%) di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Luas irigasi kewenangan Kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara (ha)}}{\text{Luas daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}} \times 100 \% \\
 & = \frac{10.108}{20.907} \times 100\% \\
 & = 48,35\%
 \end{aligned}$$

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut Tabel 3.24 membahas tentang perbandingan indikator kinerja Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir bisa dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target			Realisasi			Capaian		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik	%	60,75	62,6	50,65	60,98	50,48	48,35	100,38	80,64	99,31

Dari Tabel 3.24 dapat dilihat bahwa ada penurunan tiap 3 tahun terakhir pada sasaran strategis Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan dengan indikator proporsi lahan sawah beririgasi baik yang dilayani jaringan irigasi tahun 2025 mengalami penurunan realisasi karena disebabkan kerusakan infrastruktur daerah irigasi pasca bencana alam banjir dan tanah longsor tanggal 2 Desember 2025.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi yang dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut :

Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik	48,35	66,70	72,48	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Untuk indikator kinerja Persentase Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa kami dapatkan karena untuk nilai capaian standar dari nasional, provinsi dan nasional belum dipublikasikan.

e. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik dapat dilihat pada Tabel 3.25 dibawah ini :

Tabel 3. 25 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik	%	50,65	48,35	95,46	Tidak tercapainya target disebabkan kerusakan infrastruktur daerah irigasi pasca bencana alam banjir dantanah longsor pada 2 Desember tahun 2025	Meningkatkan pembangunan jaringan irigasi baru, termasuk saluran irigasi primer, sekunder dan tersier serta bendungan sebagai sumber air

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3. 25 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggara	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik	50,65	48,35	99,31	3.100.000.000,-	2.418.943.437,-	78,03	1 % Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin dengan indikator Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik didukung oleh program/keberhasilan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SSDA), terdiri dari 2 (dua) kegiatan namun untuk menunjang indikator Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik hanya 1 (satu) kegiatan yang selaras dengan kegiatan tersebut:

a. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut :

Sub kegiatan :

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen

Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Hasil Pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2025 seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Talang Ketaping



Gambar 3. 6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Banda Panjang



bar 3. 7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ambacang

2. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan anatar nilai target dengan realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.27 sebagai berikut :

Tabel 3. 27 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	%	34,90	35,41	100,46
Rata-rata capaian (%)						102,89

Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik (%) di hitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Panjang jalan Kabupayem dalam kondisi baik (km)}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten}} \times 100 \% \\
 & = \frac{813,70}{2.333,18} \times 100\% \\
 & = 534,88\%
 \end{aligned}$$

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut Tabel 3.28 membahas tentang perbandingan indikator kinerja Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target			Realisasi			Capaian		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	%	32,9	33,9	34,90	34,12	34,88	35,41	103,71	102,89	100,46

Dari Tabel 3.28 dapat dilihat bahwa ada peningkatan tiap 3 tahun terakhir pada sasaran strategis Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan dengan indikator Persentase Jalan Kabupaten Kondisi jelas menunjukkan bahwa adanya perbaikan dalam kualitas jalan kabupaten di pesisir selatan dari tahun ke tahun.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi yang dapat dilihat pada tabel 3.29 berikut :

Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	35,41	35,90	98,64	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Untuk indikator kinerja Persentase Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa kami dapatkan karena untuk nilai capaian standar dari nasional, provinsi dan nasional belum dipublikasikan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik Baik dapat dilihat pada Tabel 3.30 dibawah ini :

Tabel 3. 30 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	%	34,90	35,41	100,46	Peningkatan persentase jalan kondisi baik adanya kontribusi dari berbagai pihak yang dapat bekerjasama dengan baik.	Alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan kabupaten akan meningkatkan persentase jalan kondisi baik.

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan indikator Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik. Berikut tabel 3.31 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3. 31 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	34,90	35,41	100,46	19.299.911.200,-	19.146.414.038,	99,20	6,87

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin dengan indikator Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik didukung oleh program/keberhasilan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung yaitu :

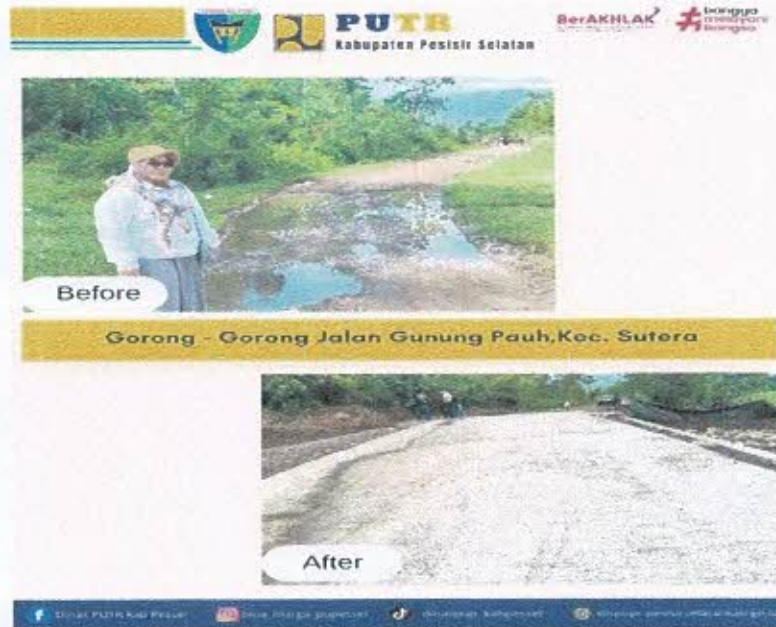
1. Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari 1 (dua) kegiatan dan 7 (Tujuh) Sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

Sub kegiatan :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Rekonstruksi Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Rehabilitasi Jembatan
- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan

Hasil Pelaksanaan kegiatan Program Penyelenggaraan Jalan pada tahun 2025 seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 8 Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Pauh, Kec. Sutera



3. Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan anatar nilai target dengan realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.32 sebagai berikut :

Tabel 3. 32 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	%	79,91	29,73	37,20
Rata-rata capaian (%)						37,20

Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi

$$= \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis}}{\text{Jumlah Kebutuhan tenaga operator dan teknisi/analisis wilayah kota}} \times 100\%$$

$$= \frac{102}{343} \times 100\%$$

$$= 29,73\%$$

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut Tabel 3.33 membahas tentang perbandingan indikator kinerja Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis yang memiliki sertifikat kompetensi Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target			Realisasi			Capaian		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan		%	-	68,49	79,91	-	2,59	29,73	-	3,78	37,20

Dari Tabel 3.33 dapat dilihat bahwa ada peningkatan tiap 2 tahun terakhir pada sasaran strategis Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan dengan indikator Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/Analis yang memiliki sertifikat kompetensi belum mengalami kenaikan yang signifikan, dikarenakan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan jasa konstruksi dan adanya biaya sertifikat kompetensi kerja (SKK) sehingga belum optimalnya pengetahuan masyarakat jasa konstruksi terhadap pentingnya sertifikasi profesi.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi yang dilayani jaringan irigasi yang dapat dilihat pada tabel 3.34 berikut :

Tabel 3. 34 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	29,73	91,32	32,55	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Untuk indikator kinerja Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa kami dapatkan karena untuk nilai capaian standar dari nasional, provinsi maupun belum dipublikasikan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Rasio Tenaga

Operator/Teknis/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi dapat dilihat pada Tabel 3.35 dibawah ini :

Tabel 3. 35 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	%	79,91	29,73	37,20	Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, adanya biaya sertifikasi kompetensi kerja (SKK) sehingga belum optimalnya pengetahuan masyarakat jasa konstruksi terhadap pentingnya sertifikasi profesi	Melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada pelaku jasa konstruksi mengenai pentingnya Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai persyaratan legalitas usaha dan peningkatan daya saing tenaga kerja konstruksi.

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan indikator Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi. Berikut tabel 3.36 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3. 36 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	79,91	29,73	37,20	184.999.972,-	129.716.166,-	70,12	Tidak Efisien

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatkan Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin dengan indikator Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik didukung oleh program/keberhasilan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung yaitu :

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) Sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

Sub kegiatan :

- Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota

c. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

- Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

Hasil Pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Jasa Konstruksi pada tahun 2025 seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 11 Dokumentasi Pelatihan & Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahun 2025

4. **Presentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukannya**
 - a. **Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Perbandingan anatar nilai target dengan realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.37 sebagai berikut :

Tabel 3. 37 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Presentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukannya	%	83,33	92,55	111,06
Rata-rata capaian (%)						111,06

$$\begin{aligned}
 &\text{Presentase untuk pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya} = \frac{\text{Jumlah Kesusaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPPR) yang Sesuai Dengan tata Ruang}}{\text{Jumlah KKPR yang Dikeluarkan}} \times 100\% \\
 &= 92,55\%
 \end{aligned}$$

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut Tabel 3.38 membahas tentang perbandingan indikator kinerja Presentase Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 38 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target			Realisasi			Capaian		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan		%	-	70	83,33	-	97,96	92,55	-	139,94	111,06

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Presentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukannya yang dilayani jaringan irigasi yang dapat dilihat pada tabel 3.39 berikut :

Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Presentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukannya	92,55	85	108,88%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Untuk indikator kinerja Presentase Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa kami dapatkan karena untuk nilai capaian standar dari nasional, provinsi maupun belum dipublikasikan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Presentase Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya dapat dilihat pada Tabel 3.40 dibawah ini :

Tabel 3. 40 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Presentase Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya	%	83,33	92,55	111,06	Perencanaan yang terintegrasi dari berbagai pihak terlibat.	Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketetapan.

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan indikator Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan peruntukannya Berikut tabel 3.39 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3. 38 Analisis Atas Efisiensi Peggungan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capai	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Presentase Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya	83,33	92,55	111,06	1.499.988.504,-	1.453.750.897,-	96,75	29.19

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin dengan indikator Presentase Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya didukung oleh program/keberhasilan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) Sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

Sub kegiatan :

- Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyusunan Peta Dasar
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan mandiri pelaku UMK

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025, tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3. 41 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket
1	Tersedianya Pemerintah yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,01)	BB (79,42)	99,15	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.308.473.708	2.987.450.225	97,59	
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas PUTR	80	92	115	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	529.671.687	461.566.522	87,14	
3	Meningkatnya Ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	90,01	90,01	100	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,	337.000.000	278.008.550	82,50	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	78,36	77,84	99,33	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.440.685.000	7.487.946.897	67,80	
	Terwujudnya Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Sektor Unggulan yang Berkualitas	Proposi lahan sawah beririgasi baik	50,65	48,35	95,46	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.615.360.000	3.152.678.157	68,31	
		Persentase jalan kabupaten Kondisi Baik	34,90	35,41	100,46	Program Penyelenggaraan Jalan	19.299.911.200	19.146.414.038	99,20	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	79,91	29,73	37,20	Program Pengembangan Jasa Konstruksi,	184.999.972	129.716.166	70,12	
		Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya	83,33	92,55	111,06	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.499.988.504	1.453.750.897	96,92	
TOTAL							48.216.090.071	41.994.853.295	87,09	

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan yang menunjang sasaran strategis tahun 2025

Dari tabel 3.41 diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar **Rp 48.216.090.071,-** terealisasi sebesar **Rp 41.994.853.295,-** atau **87,09%**. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis terdapat sisa anggaran sebesar **12,91%** atau secara absolut sebesar **Rp 6.221.236.776,-**

Sisa anggaran sebesar **Rp. 6.221.236.776,-** mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Tidak terselenggarannya pembebasan lahan karena belum tuntasnya kesepakatan dengan masyarakat dan adanya paket pekerjaan yang tidak terlaksana di Tahun Anggaran 2025 yang direncanakan dan akan dikerjakan pada Tahun Anggaran 2026

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025, yaitu :

1. Dari Sasaran Strategis dari 8 (delapan) sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai capaian indikator kinerja dengan nilai antara 37,20% sampai 115%. Dengan nilai tertinggi berada pada angka 115% dengan indikator kinerja "*Nilai Kematangan Inovasi*" dan yang terendah yaitu 37,20% dengan indikator kerjanya "*Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)*".
2. Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 terealisasi sebesar **Rp 41.994.853.295,-** dari target alokasi yang ditetapkan sebesar **Rp48.216.090.071,-**.

4.2 Saran

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi telah meningkat ke arah yang lebih baik, meskipun belum mencapai harapan yang diinginkan, namun sudah sesuai dengan rencana program dan kegiatan.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia..
3. Monitoring dan evaluasi internal perlu dilakukan secara rutin dan berkala di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing ASN sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
4. Kendala-kendala yang dihadapi pada tahun 2025 dapat menjadi pelajaran untuk mengantisipasi masalah serupa di tahun-tahun mendatang.